

**PELAKSANAAN PEMBERIAN KREDIT BERBASIS TEKNOLOGI INFORMASI  
OLEH FINTECH KEPADA PELAKU UKM  
( Studi Pengawasan OJK Surakarta)**



Disusun sebagai salah satu syarat menyelesaikan Progam Studi Strata I pada  
Jurusan Hukum Fakultas Hukum

Oleh:  
**TITIK WIJAYANTI**  
**C100130108**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA  
2018**

**HALAMAN PERSETUJUAN**  
**PELAKSANAAN PEMBERIAN KREDIT BERBASIS TEHNOLOGI INFORMASI**  
**OLEH FINTECH KEPADA PELAKU UKM**

( Studi Pengawasan OJK Surakarta )

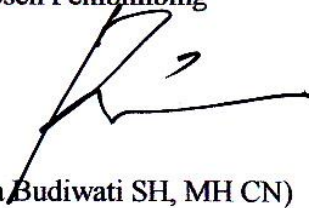
**PUBLIKASI ILMIAH**

**Oleh:**

**TITIK WIJAYANTI**  
**NIM : C100130108**

Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji oleh :

Dosen Pembimbing



(Septarina Budiwati SH, MH CN)

**HALAMAN PENGESAHAN**

**PELAKSANAAN PEMBERIAN KREDIT BERBASIS TEHNOLOGI INFORMASI**

**OLEH FINTECH KEPADA PELAKU UKM**

**( Study Pengawasan ojk Suakarta )**

Oleh:

**TITIK WIJAYANTI**

**C.100.130.108**

Telah diterima dan disahkan oleh Dewan Penguji




Fakultas Hukum

Universitas Muhammadiyah Surakarta

Pada Hari Rabu, 8 agustus 2018

Dan dinyatakan telah memenuhi syarat

Dewan Penguji

1. : Septarina Budiwati, S.H., M.H. CN (  )  
(Ketua Dewan Penguji)
2. : Wardah Yuspin, S.H., M.Kn., P.hD. (  )  
(Anggota I Dewan Penguji)
3. : Dr. Kelik Wardiono, S.H., M.H (  )  
(Anggota II Dewan Penguji)

Mengetahui

Dekan Fakultas Hukum

Universitas Muhammadiyah Surakarta



**(Prof. Dr. H. Khudzaifah Dimiyati, SH.,M.Hum)**

## **PERNYATAAN**

Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam naskah publikasi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau terdapat yang pernah ditulis atau diterbitkan orang lain, kecuali secara tertulis diacu dalam naskah dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Apabila kelak terbukti ada ketidakbenaran dalam pernyataan saya diatas, maka akan saya pertanggung jawabkan sepenuhnya.

Surakarta, 8 Agustus 2018

Penulis



Titik Wijayanti  
Nim: C100130108

**PELAKSANAAN PEMBERIAN KREDIT BERBASIS TEKNOLOGI INFORMASI  
OLEH FINTECH KEPADA PELAKU UKM  
( Studi Pengawasan OJK Surakarta )**

**Abstrak**

Dampak dari semakin pesatnya perkembangan teknologi dan internet tidak hanya merambah industri perdagangan, tetapi juga pada industri keuangan Indonesia. Hal tersebut ditandai dengan hadirnya *financial technology (fintech)*. Transaksi keuangan melalui *fintech* ini meliputi pembayaran, investasi, peminjaman uang, transfer, rencana keuangan dan perbandingan produk keuangan. Layanan keuangan digital atau financial technology (*fintech*) dilaksanakan dengan berlandaskan payung hukum. Hal ini menyusul setelah dikeluarkannya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 77/POJK.01/2016, tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi (LPMUBTI). Tujuan penelitian ini adalah untuk menjelaskan pelaksanaan pemberian kredit berbasis teknologi informasi oleh *fintech* kepada pelaku UKM, untuk menjelaskan fungsi pengawasan OJK terhadap pelaksanaan pemberian fasilitas kredit *fintech* terhadap pelaku UKM, dan untuk mendeskripsikan permasalahan yang muncul dalam pemberian kredit *fintech* terhadap pelaku UKM. Pengaturan dan pengawasan menjadi sangat penting bagi keberlangsungan *Fintech* yang ada di Indonesia. Tujuan pengaturan dan pengawasan oleh OJK adalah untuk meminimalisir risiko tersebut dan menunjang pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan stabil. Dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan yuridis empiris dengan mengkaji data primer yang ada di lapangan yang berada di Otoritas Jasa Keuangan Surakarta. Jenis penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif. Metode analisis data dilakukan dengan menggunakan logika deduktif, dimana hasil analisis kemudian disajikan secara deskriptif, untuk disusun sebagai kesimpulan dalam menjawab permasalahan.

**Kata Kunci:** *Fintech, pelaku UKM, Otoritas Jasa Keuangan, Kredit Berbasis Teknologi Informasi*

**Abstract**

The impact of the rapid development of technology and the Internet not only penetrated the trade industry, but also in the Indonesian financial industry. It is characterized by the presence of financial technology (*fintech*). These financial transactions through *fintech* include payments, investments, borrowing money, transfers, financial plans and financial product comparators. There are currently 142 companies operating in the *fintech* field identified in Indonesia. Digital financial services (*fintech*) are implemented on the basis of a legal umbrella. This is followed after the issuance of the Financial Services Authority (POJK) Regulation Number 77 / POJK.01 / 2016, on Information Technology Borrowing Borrowing Services (LPMUBTI). The purpose of this research is to explain the implementation of Fintech-based lending of information technology to SME actors to explain OJK oversight function to the implementation of the provision of *fintech* credit facilities to SME actors, and to describe the problems that arise in providing *fintech* credit to SMEs. Arrangements and controls are very important for *Fintech*'s continuity in Indonesia. OJK's regulatory and supervisory objectives are to minimize those risks and support sustainable and stable economic growth. In this study the authors use the juridical empirical approach by examining the primary data that exist in the field located in the Surakarta Financial Services Authority. Type of research used by the author in this research is descriptive research. Methods of data analysis is done by using the logic of dedukti, where the results of analysis and then presented descriptively, to be compiled as a conclusion in answering the problem

**Keywords:** *Fintech, SMEs, Financial Services Authority, Credit Based Information Technology*

## 1. PENDAHULUAN

Hadirnya globalisasi di era *millennium* ini telah membawa dampak yang besar di seluruh sektor kehidupan manusia termasuk salah satunya adalah teknologi dan internet. Teknologi dan internet memiliki peran yang begitu besar dalam menunjang segala aktivitas kehidupan manusia. Pemanfaatan teknologi digital di Indonesia yang sangat besar tentu saja memberikan dampak bagi beberapa sektor, salah satunya adalah sektor bisnis atau industri bisnis yang kemudian melahirkan perdagangan *online* atau *e-commerce*. Namun, dampak dari semakin pesatnya perkembangan teknologi dan internet tidak hanya merambah industri perdagangan, tetapi juga pada industri keuangan Indonesia. Hal tersebut ditandai dengan hadirnya *financial technology* (*fintech*).<sup>1</sup>

*Fintech* berasal dari istilah *financial technology* atau teknologi finansial. Menurut *The National Digital Research Centre (NDRC)*, di Dublin, Irlandia, mendefinisikan *fintech* sebagai “*innovation in financial services*” atau “inovasi dalam layanan keuangan *fintech*” yang merupakan suatu inovasi pada sektor finansial yang mendapat sentuhan teknologi modern. Transaksi keuangan melalui *fintech* ini meliputi pembayaran, investasi, peminjaman uang, transfer, rencana keuangan dan pembandingan produk keuangan. Saat ini terdapat 142 perusahaan yang bergerak di bidang *fintech* yang teridentifikasi beroperasi di Indonesia. Beberapa perusahaan *fintech* yang telah ada di Indonesia saat ini, misalnya CekAja, UangTeman, Pinjam, CekPremi, Bareksa, Kejora, Doku, Veritrans, Kartuku.<sup>2</sup>

Layanan keuangan digital atau *financial technology* (*fintech*) dilaksanakan dengan berlandaskan payung hukum. Hal ini menyusul setelah dikeluarkannya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 77/POJK.01/2016, tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi (LPMUBTI). Di dalam aturan tersebut, OJK mengatur berbagai hal yang harus ditaati oleh penyelenggara bisnis pinjaman dari pengguna ke pengguna, atau yang biasa disebut dengan *peer to peer lending* (P2P lending). Sehingga pada akhirnya ini akan melindungi kepentingan konsumen terkait

---

<sup>1</sup> Ernama, Budiharto, Hendro S., “Pengawasan Otoritas Jasa Keuangan Terhadap Financial Technology (Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016),” *Diponegoro Law Journal*, Vol. 6, No.3, (2017), hlm. 1-2

<sup>2</sup> *Ibid.*, hlm. 2

keamanan dana dan data, serta kepentingan nasional terkait pencegahan pencucian uang dan pendanaan terorisme, serta stabilitas sistem keuangan.<sup>3</sup>

Penyedia jasa layanan pinjaman berbasis IT diberi kesempatan oleh OJK selama 6 bulan ke depan untuk melakukan registrasi keanggotaan ke OJK, dengan syarat di antaranya, penyelenggara wajib menyediakan *escrow account* dan *virtual account* di perbankan, serta menempatkan data center di dalam negeri. Para pemberi pinjaman nantinya akan mengirimkan dana pinjaman ke *virtual account* tersebut, sedangkan *escrow account* digunakan sebagai rekening bersama, di mana penerima pinjaman harus mengirimkan kembali dana yang mereka pinjam ke rekening tersebut, untuk kemudian disalurkan kepada para pemberi pinjaman.<sup>4</sup>

Untuk menyelenggarakan bisnis P2P lending, OJK juga mengharuskan kepemilikan modal minimal Rp 1 miliar pada saat pendaftaran. Dan setelah mengajukan perizinan, jumlah modal tersebut harus sudah naik hingga mencapai Rp 2,5 miliar. Selain itu, guna melindungi kepentingan stabilitas sistem keuangan nasional, jumlah pinjaman pun dibatasi maksimal Rp 2 miliar dengan mata uang rupiah.<sup>5</sup>

Pengaturan dan pengawasan menjadi sangat penting bagi keberlangsungan *Fintech* yang ada di Indonesia. Hal ini berkaitan dengan legalitas dari bisnis yang dijalankan karena pada pelaksanaannya pengembangan *fintech* memiliki potensi risiko yakni berkaitan dengan perlindungan konsumen, stabilitas sistem keuangan, sistem pembayaran dan stabilitas ekonom. Tujuan pengaturan dan pengawasan oleh OJK adalah untuk meminimalisir risiko tersebut dan menunjang pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan stabil.<sup>6</sup>

## 2. METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan yuridis empiris. Penelitian hukum empiris merupakan salah satu jenis penelitian hukum yang menganalisis dan mengkaji bekerjanya di dalam masyarakat.<sup>7</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji menyajikan pengertian penelitian hukum sosiologis atau empiris yakni sebagai

---

<sup>3</sup> detikFinance.com, Selasa 10 Januari 2017 17:31 WIB, *OJK Keluarkan Aturan Fintech*, dalam <http://www.detikfinance.com>, diunduh Kamis, 8 Maret 2018 pukul 10:10

<sup>4</sup> *Ibid.*

<sup>5</sup> *Ibid.*

<sup>6</sup> Ernama, Budiharto, Hendro S., *Op. Cit.*, hlm. 3

<sup>7</sup> DR. H. Salim HS, S.H., M.S dan Erlies Septiana Nurbani, S.H., LL.M, 2013, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, hlm. 20

penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti data primer.<sup>8</sup> Data primer merupakan data yang berasal dari masyarakat dan atau orang yang terlibat secara langsung terhadap masalah yang diteliti.<sup>9</sup> Sehingga penelitian ini dilakukan dengan mengkaji data primer yang ada di lapangan yang berada di Otoritas Jasa Keuangan Surakarta terkait pelaksanaan pemberian kredit berbasis teknologi informasi oleh *fintech* kepada pelaku usaha kecil dan menengah berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 77/POJK.01/2016. Jenis penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif<sup>10</sup>. Dalam penelitian ini penulis mengambil lokasi di Otoritas Jasa Keuangan Surakarta. Data yang disajikan dari sumber-sumber data yang meliputi data primer dan data sekunder. Data primer yaitu data yang diperoleh berupa fakta atau keterangan hasil penelitian secara langsung di lokasi penelitian dan hasil wawancara dengan pihak Otoritas Jasa Keuangan Surakarta. Sedangkan data kepustakaan adalah data yang diperlukan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang berupa bahan-bahan hukum yang terdiri dari bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang bersifat mengikat dan bahan hukum sekunder.<sup>11</sup> Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif yaitu norma, kaidah dasar, dan peraturan perundang-undangan. Dalam penelitian ini, bahan hukum primer yang digunakan adalah Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 77/POJK.01/2016, tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi (LPMUBTI). Penelitian ini menggunakan metode studi kepustakaan adalah dengan merujuk kepada bahan-bahan yang didokumentasikan. Selain itu juga dengan studi lapangan yang dilakukan secara langsung di lokasi penelitian. Studi lapangan dilakukan dengan menggunakan teknik wawancara dengan pihak Otoritas Jasa Keuangan Surakarta. Metode analisis data dilakukan dengan menggunakan logika deduktif, untuk menarik kesimpulan dari hal yang bersifat umum menjadi kasus yang bersifat khusus atau individual.<sup>12</sup> Proses analisis data yang diperoleh dari penelitian lapangan dan studi kepustakaan selanjutnya dianalisis secara

---

<sup>8</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, 2010, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, hlm. 14

<sup>9</sup> DR. H. Salim HS, S.H., M.S dan Erlies Septiana Nurbani, S.H., LLM, *Op. Cit.*, hlm. 20

<sup>10</sup> Soerjono Soekanto, 2005, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia (UI-Press), hlm. 10

<sup>11</sup> Khudzaifah Dimiyati dan Kelik Wardiono, 2015, *Metode Penelitian Hukum (Buku Pegangan Kuliah)*, Surakarta: Universitas Muhammadiyah Surakarta, hal. 8

<sup>12</sup> Jhonny Ibrahim, 2006, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Malang: Banyumedia Publishing, hal. 242



kualitatif. Hasil analisis kemudian disajikan secara deskriptif, untuk disusun sebagai kesimpulan dalam menjawab permasalahan terkait dengan pelaksanaan pemberian kredit berbasis teknologi informasi oleh *fintech* kepada pelaku usaha kecil dan menengah berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 77/POJK.01/2016.

### **3. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **3.1 Pelaksanaan Pemberian Kredit Berbasis Teknologi Informasi oleh *Fintech* Kepada Pelaku UKM**

Sebelum mengawali pembahasan mengenai pelaksanaan pemberian kredit berbasis teknologi informasi oleh *fintech* kepada Pelaku UKM.

Bahwa berdasarkan hasil penelitian di OJK Surakarta. Terdapat banyak perusahaan yang sudah terdaftar dan berizin di OJK per 25 Januari 2018 terdapat 34 perusahaan.<sup>13</sup>

Jadi sebenarnya proses fintech dalam pemberian kredit ini disebut sebagai peer to peer lending berdasarkan POJK Nomor 77 adalah Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi adalah penyelenggara layanan jasa keuangan untuk mempertemukan pemberi pinjaman dengan penerima pinjaman dalam rangka melakukan perjanjian pinjam meminjam dalam mata uang rupiah secara langsung melalui sistem elektronik dengan menggunakan jaringan internet. Hal ini sama dengan loan based crowdfunding yaitu urun dana untuk disalurkan dalam bentuk utang dan pengurun akan mendapatkan kompensasi berupa pengembalian atas pinjaman yang diberikan beserta bunganya.<sup>14</sup>

Mekanisme pengajuan pendaftaran perusahaan sesuai dengan POJK Nomor 77/POJK. 01/2016 sebagai berikut:

Sesuai dengan POJK tersebut perusahaan dapat mendaftarkan ke OJK dengan mengajukan permohonan yang dilengkapi persyaratan sebagaimana dicantumkan dalam POJK tersebut.<sup>15</sup>

Persyaratan Umum yang harus dipenuhi adalah (1) Badan hukum berbentuk Perseroan Terbatas dan Koperasi; (2) Kepemilikan asing maksimal 85%; (3) Memiliki SDM dengan keahlian dan atau latar belakang di bidang IT; (4) DC dan DRC di

---

<sup>13</sup> Data Tertulis Hasil Wawancara terhadap OJK Surakarta

<sup>14</sup> *Ibid.*

<sup>15</sup> *Ibid.*

Indonesia; (5) Menggunakan escrow account dan virtual account di perbankan Indonesia. Dalam melakukan pendaftaran yang harus dimiliki adalah (1) Modal minimum sebesar Rp 1 miliar; (2) Platform terdaftar di Kemenkominfo; (3) Rencana umum penyelesaian hak dan kewajiban jika status terdaftar dicabut atau perizinan tidak disetujui; (4) Kelengkapan dokumen pendukung yang terdiri atas: (a) Akta pendirian badan hukum; (b) Bukti identitas diri pemegang saham dan pengurus; (c) NPWP; (d) Surat keterangan domisili; (e) Bukti kesiapan operasional; (f) Bukti pemenuhan modal.

Sehingga berdasarkan persyaratan dari OJK tersebut di atas, maka persyaratan umum bagi perusahaan yang ingin mendaftar fintech adalah yang berbentuk PT dan bisa juga berbentuk koperasi dengan kepemilikan asing maksimal 85% artinya tidak boleh semua saham dikuasai asing, sehingga kepemilikan minimal 25% berasal dari dalam negeri, kemudian perusahaan tersebut memiliki basis IT Manajemen yang bagus. Hal penting lainnya adalah memiliki escrow account. Escrow account berdasarkan Peraturan Bank Indonesia No. 3/11/PBI/2001 dalam penjelasan Pasal 4 A ayat (1) diartikan sebagai rekening yang dibuka secara khusus untuk tujuan tertentu yang digunakan untuk menampung dana yang dipercayakan kepada suatu bank atau perusahaan berdasar persyaratan tertentu yang ada dalam perjanjian tertulis. Kemudian perusahaan fintech juga harus mempunyai virtual account yang dalam artian adalah nomor identifikasi pelanggan perusahaan yang dibuka oleh bank atas permintaan perusahaan untuk selanjutnya diberikan oleh perusahaan kepada pelanggannya (baik perorangan maupun nonperorangan) sebagai Nomor Rekening Tujuan Penerimaan (Collection).

Selanjutnya, perusahaan fintech dalam mendaftar harus memiliki modal minimal sebesar 1 miliar dengan platform yang telah terdaftar di Kemenkominfo dengan memiliki kelengkapan dokumen-dokumen penunjang seperti akta pendirian, bukti identitas diri pemegang saham dan pengurus, NPWP, surat keterangan domisili, bukti pemenuhan modal dan kesiapan operasional. Pihak OJK dalam melakukan pencatatan pendaftaran juga semakin memperketat pendaftaran fintech dengan selalu melakukan monitoring pengawasan dan pembaharuan regulasi yang dikeluarkan khusus untuk mengatur berjalannya fintech.

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan penulis dengan pihak dari OJK Surakarta, pihak dari OJK Surakarta menuturkan bahwa di Solo ini belum ada perusahaan fintech, sehingga dokumen perjanjian atau apa di OJK belum ada, karena

kewenangan tersebut ada pada Kepala Eksekutif Pengawasan Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan, dan Lembaga Jasa Keuangan lainnya ada di Jakarta.<sup>16</sup>

Mengenai pendaftaran fintech di OJK, beliau menuturkan bahwa semuanya telah diatur di dalam POJK No. 77/POJK.01/ 2016.<sup>17</sup> Beliau menuturkan bahwa perjanjian yang dilakukan oleh fintech semuanya dilakukan secara online dan tidak ada yang secara tertulis, sebagaimana kutipan wawancara berikut.<sup>18</sup>

Jadi pihak OJK selalu memberikan bimbingan kepada fintech terhadap pentingnya mitigasi resiko-resiko yang mungkin terjadi dalam pelaksanaan perjanjian online. Namun fintech untuk saat ini tidak berada dalam skala atau range besar misal hanya 25 juta sesuai kesanggupan mereka dalam melakukan mitigasi resiko. Mitigasi resiko maksudnya adalah upaya untuk mengurangi terjadinya resiko atas pemberian kredit kepada seseorang. Jadi mereka tidak bisa memberikan pinjaman sampai 1 milyar, karena resikonya akan lebih besar, dan uang tersebut juga merupakan dana pinjaman. Jadi sistemnya adalah peer to peer lending, jadi ada perjanjian pinjam meminjam antara penyelenggara (fintech) dengan pemberi pinjaman, dan selanjutnya adalah perjanjian antara pemberi pinjaman dan penerima pinjaman.<sup>19</sup> Sehingga proses pendaftaran dilakukan secara bertahap dan dilakukan secara online.

Berdasarkan hasil penelitian tersebut terkait tentang pelaksanaan pemberian kredit berbasis teknologi informasi dari fintech kepada pelaku UKM, dapat dianalisis bahwa fintech untuk saat ini hanya beroperasi di Jakarta, dan untuk wilayah Solo, belum ada fintech yang melakukan pendaftaran disini. Dan proses pelaksanaan operasional fintech semuanya dilakukan dengan sistem online, dari proses pendaftaran bagi pelaku UKM yang mau mengajukan kredit ke fintech, verifikasi, dan pembuatan perjanjian dilakukan dengan sistem elektronik. Sehingga dalam operasionalnya, fintech harus benar-benar siap dalam melaksanakan pemberian kredit melalui program-programnya.

Dalam pemberian kredit dari fintech kepada nasabah dengan model sistem pemberian dana cepat, fintech telah mengatur hal-hal penting yang signifikan dalam pemberian kredit online tersebut, mengingat resiko dari perjanjian online termasuk keabsahannya juga masih banyak terdapat kelemahan dan semua basis perjanjian fintech dalam pemberian kredit kepada UKM adalah trust atau kepercayaan.

---

<sup>16</sup> Hasil wawancara pribadi dengan pihak OJK Surakarta Ibu Nova Hermawanti , tanggal 1 Mei 2018

<sup>17</sup> *Ibid.*

<sup>18</sup> *Ibid.*

<sup>19</sup> *Ibid.*

Sistem pemberian kredit dari fintech adalah berbasis layanan pinjam meminjam uang secara elektronik, dengan sistem peer to peer lending melalui platform website dari perusahaan peer lending. Hal ini dilakukan dengan cara online, yakni peminjam dana masuk ke website perusahaan yang dipilih melakukan registrasi secara online dengan data-data yang benar, kemudian mengisi form aplikasi. Kemudian pihak fintech akan melakukan verifikasi apakah peminjam tersebut layak untuk didanai berikut dengan pembayaran kembali uang yang telah dipinjamkan sesuai dengan kesepakatan-kesepakatan selanjutnya yang dibuat masing-masing pihak.

Fintech berasal dari istilah financial technology atau teknologi finansial. Menurut The National Digital Research Centre (NDRC), di Dublin, Irlandia, mendefinisikan fintech sebagai “*innovation in financial services*” atau “inovasi dalam layanan keuangan fintech” yang merupakan suatu inovasi pada sektor finansial yang mendapat sentuhan teknologi modern. Transaksi keuangan melalui fintech ini meliputi pembayaran, investasi, peminjaman uang, transfer, rencana keuangan dan pembanding produk keuangan. Saat ini terdapat 142 perusahaan yang bergerak di bidang fintech yang teridentifikasi beroperasi di Indonesia. Beberapa perusahaan *fintech yang telah ada* di Indonesia saat ini, misalnya Cek Aja, UangTeman, Pinjam, CekPremi, Bareksa, Kejora, Doku, Veritrans, Kartuku.<sup>20</sup>

Dalam pemberian kredit dari fintech kepada nasabah dengan model sistem pemberian dana cepat, fintech telah mengatur hal-hal penting yang signifikan dalam pemberian kredit online tersebut, mengingat resiko dari perjanjian online termasuk keabsahannya juga masih banyak terdapat kelemahan dan semua basis perjanjian fintech dalam pemberian kredit kepada UKM adalah trust atau kepercayaan.

Secara teoritis, *Peer-to-peer lending* atau *P2P Lending* adalah kegiatan pinjam meminjam antar perseorangan. Praktisi ini sudah lama berjalan dalam bentuk yang berbeda, seringkali dalam bentuk perjanjian informal. Dengan berkembangnya teknologi dan *e-commerce*, kegiatan peminjaman turut berkembang dalam bentuk online dalam bentuk *platform* serupa dengan e-commerce. Dengan itu, seorang peminjam bisa mendapatkan pendanaan dari banyak individu. Dalam peer lending, kegiatan dilakukan secara online melalui platform website dari berbagai perusahaan *peer lending*. Terdapat berbagai macam jenis platform, produk, dan teknologi untuk menganalisa kredit. Peminjam dan pendana tidak bertemu secara fisik dan seringkali

---

<sup>20</sup> Ernama, Budiharto, Hendro, “Pengawasan Otoritas Jasa Keuangan Terhadap *Financial Technology* (Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016)”, *Diponegoro Law Journal, Op.Cit.*, hlm, 2

tidak saling mengenal. *Peer lending* tidak sama dan tidak bisa dikategorikan dalam bentuk-bentuk institusi finansial tradisional: himpunan deposito, investasi, ataupun asuransi. Karena itu, peer lending dikategorikan sebagai produk finansial alternatif.<sup>21</sup>

Proses aplikasi pinjaman peer lending lazimnya mengikuti proses berikut. Peminjam masuk ke website, registrasi dan mengisi form aplikasi. Platform kemudian memverifikasi dan menganalisa kualifikasi pinjaman tersebut. Pinjaman yang berhasil lolos di posting di website di mana pendana bisa memberikan komitmen dana untuk pinjaman itu. Ada beberapa cara yang di adopsi berbagai platform peer lending untuk mencocokkan peminjam dengan pendana.<sup>22</sup> Berdasarkan hal tersebut, dapat disimpulkan bahwa meskipun terdapat kurang lebih 40 fintech yang beroperasi di Indonesia, namun belum ada fintech yang terdaftar di Surakarta. Dimana pelaksanaan pemberian fasilitas kredit dari fintech kepada pihak UKM atau pelaku usaha atau masyarakat yang butuh dana cepat dilakukan secara online berdasarkan sistem peer to peer lending.

Pengaturan mengenai pelaksanaan perjanjian tersebut ada pada mitigasi resiko masing-masing fintech mengingat masih banyak kelemahan dari pinjam meminjam yang dilakukan secara online tersebut, termasuk nanti di kemudian hari jika ada pihak baik dari pihak UKM atau peminjam yang menyalahi aturan-aturan digital yang telah ditetapkan fintech sebelumnya dan telah disepakati.

### **3.2 Fungsi Pengawasan OJK terhadap Pelaksanaan Pemberian Fasilitas Kredit Fintech terhadap Pelaku UKM**

Pemerintah Indonesia melalui Menteri Keuangan kemudian menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 60/PMK. 03/2014 tentang Tata Cara Pertukaran Informasi (Exchange of Information). PMK ini kemudian diubah dengan PMK No. 25/PMK.010/2015. Dalam upaya untuk sinkronisasi terhadap PMK tersebut, Otoritas Jasa Keuangan menerbitkan Peraturan No. 25/POJK.03/2015 tentang Penyampaian Informasi Nasabah Asing terkait Perpajakan kepada Negara Mitra atau Yurisdiksi Mitra. Upaya Otoritas Jasa Keuangan dalam memberikan perlindungan hukum terhadap rahasia perbankan pasca dikeluarkan Peraturan OJK Nomor 25/POJK.03/2015 pada prinsipnya tetap mengacu pada peraturan perundang - undangan yang berlaku. Perihal sampai batas mana OJK melindungi rahasia bank, bahwa OJK

---

<sup>21</sup> Gita Andini, "Faktor-Faktor Yang Menentukan Keputusan Pemberian Kredit Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Pada Lembaga Keuangan Mikro *Peer to Peer Lending*," *Skripsi*, FEB, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2017, hlm. 51

<sup>22</sup> *Ibid.*

memberikan perlindungan terhadap rahasia bank sampai batas yang ditentukan oleh Undang-Undang karena dalam hal ini OJK tidak boleh bertindak diluar kewenangan yang diberikan Undang-Undang.<sup>23</sup>

Lembaga pengawasan sektor jasa keuangan tersebut dikenal dengan nama Otoritas Jasa Keuangan (selanjutnya disingkat OJK). Undang-Undang tentang OJK pada dasarnya memuat ketentuan tentang organisasi dan tata kelola (governance) dari lembaga yang memiliki otoritas pengaturan dan pengawasan terhadap sektor jasa keuangan. OJK dibentuk dengan tujuan agar keseluruhan kegiatan jasa keuangan di dalam sektor jasa keuangan terselenggara secara teratur, adil, transparan, dan akuntabel, serta mampu mewujudkan system keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil, dan mampu melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat.<sup>24</sup>

Dalam menjelaskan mengenai fungsi pengawasan OJK terhadap pelaksanaan pemberian fasilitas kredit fintech terhadap pelaku UKM. Berdasarkan hasil penelitian ditemukan bahwa OJK merupakan lembaga negara yang independen atau mandiri yang dibentuk atas dasar perundang-undangan atau dalam hal ini berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 tahun 2011 yang memiliki fungsi sebagai penyelenggara sistem pengaturan dan juga pengawasan yang terintegrasi atas seluruh kegiatan atau aktivitas di bidang sektor keuangan baik di sektor pasar modal, sektor perbankan maupun sektor jasa keuangan non bank, yakni khususnya *fintech*, kemudian yang lainnya adalah Asuransi, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan, Reksadana, dan juga Lembaga Jasa Keuangan lainnya.<sup>25</sup>

Peraturan OJK yang mengatur secara spesifik tentang crowdfunding belum ada. Terkait dengan Financial Technology, sampai dengan saat ini peraturan yang diterbitkan oleh OJK adalah POJK No. 77 /POJK.01/2016 tanggal 29 Desember 2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Berbasis Teknologi Informasi. Crowdfunding pada dasarnya masuk dalam financial inclusion satu dari empat fokus sektor fintech yang aturannya tengah disusun oleh OJK, antara lain sektor payment gateway, digital currency, dan financial literacy. Crowdfunding sendiri terdapat beberapa jenis, yaitu loan based crowdfunding, equity based crowdfunding, dan donation based crowdfunding. Yang menjadi konsentrasi OJK adalah loan based crowdfunding atau

---

<sup>23</sup> Wardah Yuspin, Diki Agung Pranoto, "Mendobrak Rahasia Perbankan Pasca Berlakunya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 25/POJK.03/2015," *Prosiding Konferensi Nasional Ke-6, Asosiasi Program Pascasarjana Perguruan Tinggi Muhammadiyah (APPTM)*, hlm.1

<sup>24</sup> Wardah Yuspin, Raden Panji D.A, "Analisis Yuridis Independensi OJK (Otoritas Jasa Keuangan) dalam Upaya Pengawasan Bank," *Naskah Publikasi Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Surakarta*, hlm. 3

<sup>25</sup> Data Tertulis dari Pamflet Otoritas Jasa Keuangan

peer to peer lending. Hal ini sesuai dengan kewenangan OJK dalam mengawasi lembaga jasa keuangan baik bank maupun non bank, sehingga layanan yang diawasi terkait lembaga jasa keuangan tersebut adalah pinjam meminjam (loan).<sup>26</sup>

Lebih lanjut, OJK akan membuat kajian dan ketentuan terkait hal tersebut, mengingat perkembangan financial technology yang pesat yaitu jumlah perusahaan start up fintech yang berkembang di Indonesia meningkat lebih dari 3x lipat dari 40 perusahaan di tahun 2014 menjadi 165 perusahaan di akhir tahun 2016. Tidak termasuk Fintech yang didirikan oleh institusi jasa keuangan, perusahaan telco dan start-up fintech asing yang sudah beroperasi di Indonesia. Selain itu, sistem layanan berbasis teknologi ini juga salah satu cara untuk mengurai ketidakefisiensian lembaga jasa keuangan dalam melakukan pelayanan kepada masyarakat yang tidak tersentuh oleh OJK. Tahun 2018, OJK sedang menyusun surat edaran OJK terkait pelaporan dan pengawasan fintech.<sup>27</sup>

Berdasarkan keterangan lebih lanjut yang diberikan pihak OJK Surakarta, bahwa pihaknya terus melakukan kajian terhadap fintech, sebab fintech ini berkembang cukup pesat sehingga harus dilakukan kajian secara terus menerus dalam membuat regulasi maupun kebijakan baru.<sup>28</sup> Pihaknya menuturkan bahwa OJK juga melakukan pengawasan dalam hal pendaftaran fintech, dengan cara memperketat ijinnya dan lain sebagainya. Termasuk nanti selang beberapa bulan, pihak fintech harus melaporkan mengenai kegiatan atau aktivitas yang dilakukan. Namun pengawasan seluruhnya ada dalam kantor pusat, di OJK Surakarta hanya meneruskan izin jika ada fintech yang mendaftar di Surakarta.<sup>29</sup>

Berdasarkan hasil penelitian tersebut yang berkaitan dengan fungsi pengawasan OJK dalam pelaksanaan pemberian kredit dari fintech kepada UKM, dapat dianalisis sebagai berikut.

Bahwa keberadaan fintech di Indonesia terus mendapatkan pengawasan yang ketat dari OJK, sebab dari pendaftaran fintech hingga operasional fintech merupakan bagian dari fungsi pengawasan yang dimiliki OJK. Sehingga akan terus dibuat regulasi-regulasi baru selain POJK Nomor 77 tahun 2016 ke depan, yang mengatur fintech dalam aspek-aspek yang lain. Termasuk dalam pengaturan izin dalam pendaftaran

---

<sup>26</sup> *Ibid.*

<sup>27</sup> *Ibid.*

<sup>28</sup> Hasil Wawancara Pribadi Penulis dengan OJK Surakarta Ibu Nova Hermawanti, tanggal 1 Mei 2018

<sup>29</sup> *Ibid.*

fintech dan pelaporan-pelaporan kegiatan atau aktivitas yang dijalankan oleh fintech berdasarkan platform website yang dimiliki.

Dalam hal ini, fungsi pengawasan OJK terhadap pelaksanaan kredit yang diberikan fintech kepada pelaku UKM adalah dalam hal pinjam-meminjam yang secara elektronik (peer to peer lending) atau yang disebut loan based crowdfunding. Dalam layanan pinjam meminjam uang tersebut terdapat dua bentuk perjanjian elektronik, yang pertama adalah perjanjian antara penyelenggara dengan pemberi pinjaman, dan yang kedua adalah perjanjian antara pemberi pinjaman dan penerima pinjaman, dimana semua perjanjian tersebut dituangkan dalam dokumen elektronik.

Pengaturan lebih lanjut dari OJK terkait pengawasan terhadap tumbuh kembangnya fintech yang ada di Indonesia berkaitan dengan potensi risiko terkait perlindungan konsumen, stabilitas sistem keuangan, sistem pembayaran sehingga tujuan pengawasan dari OJK adalah dalam rangka meminimalisir risiko-risiko yang dimungkinkan muncul dalam pelaksanaan perjanjian kredit dari fintech kepada pelaku UKM. Seiring dengan perkembangan *fintech* yang terus menggeliat hingga saat ini, tentu harus diimbangi juga dengan hadirnya regulasi dan pengawasan yang jelas terhadap berjalannya bisnis tersebut. Berdasarkan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang menyatakan bahwa OJK berfungsi menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan.

Apabila mengacu pada pasal tersebut, OJK adalah instansi yang melakukan pengaturan dan pengawasan terhadap tumbuh kembangnya *fintech*. *Fintech startup* termasuk bagian sektor jasa keuangan baik Industri Keuangan Bank (IKB) maupun Industri Keuangan Non-Bank (IKNB) yang diawasi oleh OJK.

Pengaturan dan pengawasan menjadi sangat penting bagi keberlangsungan *Fintech* yang ada di Indonesia. Hal ini berkaitan dengan legalitas dari bisnis yang dijalankan karena pada pelaksanaannya pengembangan *fintech* memiliki potensi risiko yakni berkaitan dengan perlindungan konsumen, stabilitas sistem keuangan, sistem pembayaran dan stabilitas ekonom. Tujuan pengaturan dan pengawasan oleh OJK adalah untuk meminimalisir risiko tersebut dan menunjang pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan stabil.<sup>30</sup>

---

<sup>30</sup> Ernama, Budiharto, Hendro, "Pengawasan Otoritas Jasa Keuangan Terhadap *Financial Technology* (Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016)", *Diponegoro Law Journal, Op.Cit.*, hlm. 3



Untuk merespon permasalahan *fintech* saat ini OJK telah membentuk Satuan Tugas Pengembangan Inovasi Digital Ekonomi dan Keuangan untuk mengawasi pelaku *fintech* dan pada akhir tahun 2016 tepatnya tanggal 29 Desember 2016, akhirnya OJK mengeluarkan pengaturan mengenai *fintech* yaitu Peraturan OJK Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi (LPMUBTI). POJK tersebut memuat aturan mengenai penyediaan, pengelolaan, dan pengoperasian Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi.<sup>31</sup>

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa OJK terus secara spesifik melakukan pengaturan-pengaturan dalam mengatur perkembangan *fintech* di Indonesia dan juga melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pemberian kredit oleh *fintech* kepada UKM maupun kepada masyarakat yang butuh dana cepat. Sehingga di kemudian hari akan berkembang aturan-aturan yang lebih signifikan yang mengatur tentang *fintech* itu sendiri.

Hal ini sesuai dengan kewenangan yang dimiliki OJK dalam mengawasi lembaga jasa keuangan khususnya *fintech*, dan sesuai dengan tujuan penyelenggaraan *fintech* untuk mempertemukan pemberi pinjaman dan penerima pinjaman dalam rangka melakukan perjanjian pinjam meminjam secara elektronik dengan memanfaatkan teknologi. Pengawasan yang dilakukan oleh OJK termasuk dalam hal pendaftaran *fintech* yang mengajukan permohonan pendirian di OJK dengan melalui serangkaian tahap, seperti verifikasi penyediaan modal, adanya sistem IT yang bagus yang dijalankan di balik *fintech* tersebut dan platformnya telah terdatar di Kemenkominfo.

### **3.3 Permasalahan yang Muncul dalam Pemberian Kredit *Fintech* terhadap Pelaku UKM**

Mengenai permasalahan yang muncul dalam pemberian kredit *fintech* terhadap pelaku UKM, di antara banyaknya ditemukan kelemahan-kelemahan dalam pelaksanaan perjanjian secara online tersebut. Dimana segala manfaat ekonomi, kerugian yang ditimbulkan, serta dampak hukum dari kegiatan pinjam meminjam yang dilakukan secara langsung sepenuhnya menjadi tanggung jawab para pihak sesuai dengan kesepakatan yang telah diperjanjikan. Praktik ini masih dinilai terdapat banyak kelemahan yang diantaranya sebagai berikut:<sup>32</sup> (1) Pelaksanaan kegiatan pinjam meminjam dilakukan oleh para pihak yang sudah saling mengenal dan tidak harus bertatap muka; (2) Subjektivitas analisa resiko gagal bayar; (3) Kesulitan dalam

---

<sup>31</sup> *Ibid.*

<sup>32</sup> Data Tertulis Hasil Wawancara dengan Pihak OJK Surakarta Ibu Nova Hermawanti

penagihan pembayaran; (4) Sistemasi pencatatan pelunasan; (5) Kegagalan sistem yang digunakan oleh penyelenggara; (6) Kesalahan informasi karena tidak adanya verifikasi secara langsung; (7) Kesalahan transaksi.

Beberapa resiko pinjaman online yang wajib dipahami peminjam diunduh dari salah satu platform Fintech [www.duwitmu.com](http://www.duwitmu.com) adalah sebagai berikut: (1) Untuk setiap pembayaran yang melewati jatuh tempo pembayaran, peminjam akan dikenakan biaya keterlambatan sesuai dengan kriteria pinjaman; (2) Mengenai biaya administrasi penagihan, ketika menunggak, maka resikonya tidak hanya menghadapi penagihan, tetapi juga tambahan biaya karena perusahaan pinjaman online meminta biaya atas keterlambatan pembayaran (late fee). Disamping itu, karena proses penagihan membutuhkan extra sumber daya manusia, beberapa perusahaan pinjaman online membebankan biaya penagihan kepada nasabah yang menunggak; (3) Sehingga sanksi peminjam yang tidak membayar online, diantaranya perusahaan pinjaman online akan melakukan tindakan penagihan. Tindakan penagihan mulai dari yang sifatnya reminder sampai dengan intensif agar nasabah membayar kewajibannya. Kemudian melaporkan nasabah ke biro kredit yang diwajibkan oleh OJK kepada setiap perusahaan Fintech. Pelaporan ini bertujuan memastikan bahwa nasabah yang tidak bayar tidak dapat mengajukan pinjaman kembali; (4) Resiko operasional, bangkrut dan dibawa lari. Investor dalam hal ini menghadapi resiko operasional yang kritikal; (5) Jika kreditor menunggak, resiko ditanggung investor. Investor perlu menyadari sejak awal bahwa mereka menanggung sepenuhnya resiko gagal bayar kredit. Pengelola P2P lending tidak menyerap kerugian jika kreditor menunggak. Investor harus siap kehilangan dana mereka. Ini disebut resiko kredit.

Berdasarkan hasil penelitian tersebut mengenai permasalahan yang timbul dalam pelaksanaan pemberian kredit fintech kepada pelaku UKM, dapat dianalisis bahwa kelemahan atau kendala yang timbul dalam pelaksanaan pemberian layanan pinjam meminjam uang secara elektronik di antaranya adalah karena operasional pelaksanaan kredit dilakukan secara online, sehingga tidak ada pihak yang bertatap muka baik peminjam maupun pemberi pinjaman serta penyelenggara.

Selain itu, kelemahan lainnya adalah jika terjadi gagal bayar dari pihak peminjam atau kesulitan yang ditemukan oleh penyelenggara atau pemberi pinjaman dalam melakukan penagihan pembayaran, selain itu juga dimungkinkan terjadi kesalahan transaksi, maupun kesalahan informasi yang diberikan oleh pihak penyelenggara karena sistem yang dibangun di platform website tidak memiliki sistem IT yang bagus,

sehingga mengakibatkan error yang mengganggu proses pinjam meminjam uang secara elektronik. Dan masih banyak kelemahan-kelemahan lain yang ditemukan, sehingga dalam hal ini, mitigasi resiko yang dibangun oleh perusahaan fintech merupakan faktor penting dalam meminimalisir resiko yang terjadi itu sendiri.

Dalam menyikapi kelemahan-kelemahan yang terjadi di kemudian hari termasuk jika terjadinya gagal bayar, atau kesulitan dalam penagihan pembayaran, termasuk adanya kesalahan informasi atau kesalahan transaksi yang dilakukan, dan juga adanya jaringan error dalam fintech adalah merupakan bagian dari mitigasi resiko yang senantiasa harus dibangun dan diperkuat oleh fintech itu sendiri. Sehingga kelemahan-kelemahan tersebut dapat diawasi dan terus diperbaiki dalam penyelenggaraan pinjaman yang lebih baik.

## **4. PENUTUP**

### **4.1 Kesimpulan**

*Pertama.* Bahwa pelaksanaan pemberian kredit berbasis teknologi informasi oleh fintech kepada pelaku UKM. Terdapat banyak perusahaan yang sudah terdaftar dan berizin di OJK per 25 Januari 2018 terdapat 34 perusahaan. Meskipun terdapat kurang lebih 40 fintech yang beroperasi di Indonesia, namun belum ada fintech yang terdaftar di Surakarta. Dimana pelaksanaan pemberian fasilitas kredit dari fintech kepada pihak UKM atau pelaku usaha atau masyarakat yang butuh dana cepat dilakukan secara online berdasarkan sistem peer to peer lending. Pengaturan mengenai pelaksanaan perjanjian tersebut ada pada mitigasi resiko masing-masing fintech mengingat masih banyak kelemahan dari pinjam meminjam yang dilakukan secara online tersebut, termasuk nanti di kemudian hari jika ada pihak baik dari pihak UKM atau peminjam yang menyalahi aturan-aturan digital yang telah ditetapkan fintech sebelumnya dan telah disepakati.

*Kedua.* Bahwa fungsi pengawasan OJK terhadap pelaksanaan pemberian fasilitas kredit *fintech* kepada pelaku UKM. OJK terus secara spesifik melakukan pengaturan-pengaturan dalam mengatur perkembangan fintech di Indonesia dan juga melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pemberian kredit oleh fintech kepada UKM maupun kepada masyarakat yang butuh dana cepat. Sehingga di kemudian hari akan berkembang aturan aturan yang lebih signifikan yang mengatur tentang fintech itu sendiri. Hal ini sesuai dengan kewenangan yang dimiliki OJK dalam mengawasi lembaga jasa keuangan khususnya fintech, dan

sesuai dengan tujuan penyelenggaraan fintech untuk mempertemukan pemberi pinjaman dan penerima pinjaman dalam rangka melakukan perjanjian pinjam meminjam secara elektronik dengan memanfaatkan teknologi. Pengawasan yang dilakukan oleh OJK termasuk dalam hal pendaftaran fintech yang mengajukan permohonan pendirian di OJK dengan melalui serangkaian tahap, seperti verifikasi penyediaan modal, adanya sistem IT yang bagus yang dijalankan di balik fintech tersebut dan platformnya telah terdapat di Kemenkominfo.

*Ketiga.* Bahwa permasalahan yang muncul dalam pemberian kredit *fintech* terhadap pelaku UKM. Berdasarkan masing-masing hubungan baik di antara penyelenggara, pemberi pinjaman, dan penerima pinjaman telah diatur sedemikian rupa mengenai mitigasi resiko, sehingga dalam masing-masing hubungan telah ada ketentuan atau perjanjian yang mengingat termasuk mengenai ketentuan dana yang dibutuhkan, tujuan peminjaman dana tersebut, besarnya bunga pinjaman dan jangka waktu pengembalian pinjaman semua harus disepakati secara jelas, termasuk pula dengan agunan atau jaminan yang diberikan oleh peminjam dana. Dalam menyikapi kelemahan-kelemahan yang terjadi di kemudian hari termasuk jika terjadinya gagal bayar, atau kesulitan dalam penagihan pembayaran, termasuk adanya kesalahan informasi atau kesalahan transaksi yang dilakukan, dan juga adanya jaringan error dalam fintech adalah merupakan bagian dari mitigasi resiko yang senantiasa harus dibangun dan diperkuat oleh fintech itu sendiri. Sehingga kelemahan-kelemahan tersebut dapat diawasi dan terus diperbaiki dalam penyelenggaraan pinjaman yang lebih baik.

## **4.2 Saran**

*Pertama.* Kepada pihak fintech dalam melaksanakan pinjam meminjam uang secara elektronik melalui sistem peer to peer lending agar dapat meningkatkan dalam hal mitigasi resiko masing-masing platform fintech yang telah terdaftar di OJK, sehingga resiko yang timbul sebagai akibat perjanjian antara fintech dan peminjam dana dapat diminimalisir.

*Kedua.* Kepada pihak OJK dalam mengawasi perkembangan fintech di Indonesia, dapat terus didorong perkembangan fintech termasuk di wilayah Surakarta, maupun di setiap provinsi agar fintech tidak hanya beroperasi di pusat, namun juga dapat dijangkau di setiap provinsi.

*Ketiga.* Kepada pihak peminjam dana agar dapat meningkatkan trust atau kepercayaan kepada fintech, agar sistem ekonomi dapat stabil berlangsung dan dari pihak peminjam dana mengantisipasi akan hambatan-hambatan terkait pelaksanaan pemberian kredit termasuk apabila terjadi kesalahan informasi maupun kesalahan transaksi atau jaringan error yang ada di website fintech.

## **Persantunan**

Skripsi ini, penulis persembahkan kepada: Orang tua saya yang tercinta atas doa, dukungan yang penuh dan juga penantiannya. Selain itu, karya tulis ilmiah ini juga saya persembahkan untuk dosen-dosen fakultas hukum yang telah memberikan ilmu yang bermanfaat bagi penulis, kakak tersayang atas dukungan, doa, dan semangatnya. Selain itu juga kepada sahabat-sahabatku atas motivasi, dukungan dan doanya selama ini.

## **DAFTAR PUSTAKA**

### **Buku dan Artikel Ilmiah**

- Data Tertulis Hasil Wawancara dengan pihak OJK Surakarta.
- Ernama, Budiharto, Hendro S. “Pengawasan Otoritas Jasa Keuangan Terhadap Financial Technology (Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016).” *Diponegoro Law Journal*. Vol. 6, No.3, (2017)
- Gita Andini, “Faktor-Faktor Yang Menentukan Keputusan Pemberian Kredit Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Pada Lembaga Keuangan Mikro Peer to Peer Lending,” *Skripsi*, FEB, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2017
- Hasil Wawancara Pribadi dengan Pihak OJK Surakarta
- Ibrahim, Jhonny. 2006. *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Banyumedia Publishing
- Khudzaifah Dimyati dan Kelik Wardiono. 2015. *Metode Penelitian Hukum (Buku Pegangan Kuliah)*. Surakarta: Universitas Muhammadiyah Surakarta
- Salim dan Erlies Septiana Nurbani. 2013. *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada
- Soekanto, Soerjono. 2005. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia (UI-Press)
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji. 2010. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Raja Grafindo Persada
- Wardah Yuspin, Diki Agung Pranoto, “Mendobrak Rahasia Perbankan Pasca Berlakunya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 25/POJK.03/2015,” *Prosiding Konferensi Nasional Ke-6, Asosiasi Program Pascasarjana Perguruan Tinggi Muhammadiyah (APPTM)*
- Wardah Yuspin, Raden Panji D.A, “Analisis Yuridis Independensi OJK (Otoritas Jasa Keuangan) dalam Upaya Pengawasan Bank,” *Naskah Publikasi Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Surakarta*

**Website**

detikFinance.com, Selasa 10 Januari 2017 17:31 WIB, *OJK Keluarkan Aturan Fintech*, dalam <http://www.detikfinance.com> , diunduh Kamis, 8 Maret 2018 pukul 10:10

**Undang-Undang**

UU No. 10 tahun 1998 tentang Perbankan

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 77/POJK.01/2016, tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi (LPMUBTI)